BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi pada zaman sekarang ini menuntut keterandalannya suatu laporan keungan baik dalam lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaporan keuangan khususnya pemerintah daerah sekarang ini semakin diperhatikan oleh pemerintah. Keterandalan sebuah laporan keuangan daerah dirasa sangat penting karena dijadikan sebagi sebuah pedoman dalam pengambilan suatu keputusan oleh pemerintah pusat.

Seperti yang tertera dalam PP No 71 tahun 2010 bahwa setiap laporan keuangan harus dapat dipercaya, efisien, terhidar dari kesalahan dan teruji keterandalannya. Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka melaksanakan akuntabilitas sektor publik. Penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk kebutuhan transparasi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik(Riyanti, Rani,dkk. 2015)

Sistem Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (LK) pemerintahan (Purwanugraha dkk, 2011). Pemerintahan mengalami

pembaharuan yang baik dalam hal pencatatan dan peneglolaan keuangan seteah menerapkan SAP dalam pemerintahan (Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh, 2008). Meskipun keterbatasan dalam hal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi pemerintah antara lain yaitu menyangkut sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti penyiapan peraturan, sistem, dan infrastruktur yang belum sempurna, kurangnya komitmen pimpinan K/L, banyaknya jumlah satuan kerja yang masih belum memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan, serta belum tersedianya SDM dengan kualitas memadai di bidang keuangan dan akuntansi. Untuk itu menerapkan SAP yang lebih konsisten dengan standar yang diharapkan, serta diperlukan perubahan pola pikir.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (*www.djkd.kemendagri.go.id*)

Hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Mimba (2014) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Penelitian yang lain Evicahyani dan Setiawina (2016) menunjukkan bahwa pemanfaat SIPKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap Kulitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang. Penelitian yang lain Evicahyani dan Setiawina (2016) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang lain indriasih dan Koeswayo (2014) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

Meningkatnya permintaan masyarakat akan tata pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui akuntabilitas media yang dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan keuangan (Yuliarta, 2013), sebuah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai basis pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semestinya berguna dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan (Subagjo, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwis et., al. (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan manajemen keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern menurut Undang-Undang No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per undang-undangan. Kualias laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi efektifitas sistem pengendalian intern.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani dan Setiawina (2016) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Adanya pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta dibutuhkan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa Penerapan Standar akuntasi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

Berdasarkan hasil masalah yang timbulkan maka peneliti dapat mengambil penlitian dengan judul : **"Pengaruh Efektifitas Penerapan Sipkd, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan, Penerapan Spip, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas SKPD dan Badan-Badan Kabupaten Karangayar)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Efektivitas Penerapan SIPKD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Penerapan SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Efektivitas Penerapan SIPKD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk menganalisis Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk menganalisis Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk menganalisis Penerapan SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Untuk menganalisis Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian dapat memperluas wawasan dan ide yang bisa dijadikan sebagai literatur dan referensi acuan dalam penelitian lain maupun pada perusahaan. Hasil bisa digunakan sebagai pemahaman lebih mendalam tentang Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (Sipkd), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Spip), Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas SKPD dan Badan-Badan Kabupaten Karangayar).

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mengadakan evaluasi bagi Dinas SKPD dan Badan-Badan Kabupaten Karangayar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan mutu kinerja Pegawai.